



Analisis Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Pelaku Usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi

Rizky Adiansyah^{1*}, Selamat Rahmadi², Jaya Kusuma Edy³

¹⁻³Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rizkyadiansyah48@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the socio-economic characteristics, income levels, and welfare levels of business actors at Lake Sipin Tourism, Jambi City. A descriptive survey approach was employed, involving 50 business actors as the sample selected through a saturated sampling technique. Data were collected using structured questionnaires, while descriptive analysis based on criteria established by the Central Statistics Agency was applied as the primary analytical tool. The findings reveal that the socio-economic profile of business actors is predominantly female, with an average age of 42 years, a senior high school educational background, and operating food-based businesses independently with considerably limited capital. In terms of income, the average monthly net income of Rp2,486,000 falls within the moderate category according to the Central Statistics Agency criteria, although 40% of respondents still belong to the low-income group. Meanwhile, the welfare level was measured through the proportion of food consumption expenditure relative to total household expenditure, which reached 48.41% per month, placing the majority of business actors within the moderate welfare category overall.*

Keywords: *Business Actors; Income Level; MSME; Sipin Lake; Welfare Level.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi, tingkat pendapatan, dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di Wisata Danau Sipin, Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan adalah survei deskriptif dengan melibatkan 50 pelaku usaha sebagai sampel yang dipilih melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan analisis deskriptif berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik digunakan sebagai alat analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil sosial ekonomi pelaku usaha didominasi oleh perempuan dengan rata-rata usia 42 tahun, berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta menjalankan usaha berbasis makanan secara mandiri dengan modal yang relatif terbatas. Dari segi pendapatan, rata-rata pendapatan bersih bulanan sebesar Rp2.486.000 berada dalam kategori sedang menurut kriteria Badan Pusat Statistik, meskipun masih terdapat 40% responden yang termasuk dalam kelompok berpendapatan rendah. Sementara itu, tingkat kesejahteraan diukur melalui proporsi pengeluaran konsumsi pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga yang mencapai 48,41% per bulan, sehingga sebagian besar pelaku usaha berada dalam kategori kesejahteraan sedang secara keseluruhan.

Kata Kunci: Danau Sipin; Pelaku Usaha; Tingkat Kesejahteraan; Tingkat Pendapatan; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan sektor informal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dalam kajian ekonomi pembangunan. Sektor ini mencakup berbagai bentuk aktivitas ekonomi mandiri yang beroperasi di luar regulasi formal, seperti usaha perseorangan, usaha keluarga tanpa upah, dan pekerja musiman di berbagai bidang. Meskipun kerap dipandang marginal, sektor informal justru menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi tekanan ekonomi, bahkan mampu menjadi penyangga utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah ketika sektor formal tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Keterbatasan sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai secara langsung mendorong lahirnya beragam unit usaha di sektor informal sebagai alternatif sumber penghidupan yang nyata bagi masyarakat.

Di Indonesia, pertumbuhan sektor informal berjalan seiring dengan keterbatasan daya tampung sektor formal yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan dan keahlian khusus. Kondisi ini mendorong sebagian besar pencari kerja untuk menciptakan peluang usaha secara mandiri, khususnya di bidang perdagangan dan jasa skala kecil. Menurut (Hiariey, 2013), sektor informal mencerminkan unit atau tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai aktivitas di luar kerangka sektor formal, sementara (Badan Pusat Statistik, 2022) mendefinisikannya sebagai kegiatan yang dilakukan individu atau keluarga berdasarkan kesepakatan yang tidak terikat secara hukum. Peran sektor informal dalam perekonomian nasional pun tidak bisa dianggap kecil, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam menyerap angkatan kerja dan menyediakan barang serta jasa dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas.

Dinamika serupa juga terjadi di Kota Jambi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Tingginya arus migrasi dari kabupaten-kabupaten sekitar maupun antarpulau menyebabkan persaingan untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal semakin ketat, sehingga mendorong semakin banyaknya pelaku usaha baru yang bergerak di sektor informal, terutama perdagangan (Keiku, 2020). Kondisi ini tercermin dari data *Badan Pusat Statistik* (BPS) Provinsi Jambi tahun 2023 yang menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi mencapai 176.051 unit, yang didominasi oleh usaha mikro sebanyak 165.558 unit. Kota Jambi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah UMKM tertinggi di seluruh Provinsi Jambi, yakni sebanyak 50.747 unit, dengan rincian 46.912 unit usaha mikro dan 3.835 unit usaha kecil. Angka ini mencerminkan betapa besarnya peran sektor informal dalam menopang struktur perekonomian daerah sekaligus menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Salah satu kawasan yang menjadi sentra berkembangnya pelaku usaha sektor informal di Kota Jambi adalah Wisata Danau Sipin. Kawasan ini merupakan destinasi wisata alam yang terletak di antara Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Telanaipura, terbentuk dari fenomena *oxbow lake* akibat perubahan aliran Sungai Batanghari. Danau Sipin memiliki luas sekitar 40 hektar dengan panorama alam yang eksotis dan suasana yang sejuk, menjadikannya salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi masyarakat Kota Jambi maupun wisatawan dari luar daerah. Keramaian pengunjung inilah yang kemudian membuka peluang ekonomi cukup besar bagi para pelaku usaha yang menjajakan berbagai produk makanan, minuman, dan jasa hiburan di sekitar kawasan tersebut (Jose & Araujo, 2021).

Tingkat pendapatan yang diperoleh pelaku usaha di kawasan wisata tersebut secara langsung berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan mereka. Dalam konteks ekonomi, peningkatan pendapatan riil seseorang berbanding lurus dengan peningkatan kesejahtraannya,

meskipun kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari aspek material, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan non-material (Nababan, 2023). Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kondisi pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha di kawasan wisata menjadi penting sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis karakteristik sosial ekonomi pelaku usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi; (2) menganalisis tingkat pendapatan pelaku usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi; dan (3) menganalisis tingkat kesejahteraan pelaku usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi..

2. KAJIAN TEORITIS

Sektor Informal

Sektor informal merupakan keseluruhan unit usaha yang tidak memiliki struktur organisasi dan operasional yang terstandarisasi, tidak terdaftar secara resmi, serta tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Merinci karakteristik khas sektor ini, di antaranya aktivitas usaha yang bersifat sederhana dan berskala kecil, belum memiliki izin usaha yang sah, lebih fleksibel dalam operasional, tingkat pendapatan pelakunya cenderung rendah, serta ragam jenis usaha yang sangat beragam. Organisasi Perburuhan Internasional atau Mangawuhi (2024) memperluas cakupan konsep ini dengan menyebutnya sebagai ekonomi informal, yakni seluruh bentuk hubungan kerja yang tidak terikat oleh peraturan perlindungan tenaga kerja maupun jaminan sosial yang berlaku. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal berfungsi sebagai penyangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak tertampung di sektor formal, sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja yang fleksibel dan aksesibel bagi berbagai kalangan angkatan kerja.

Pelaku Usaha

Secara yuridis, definisi pelaku usaha termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha yang didirikan dan berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia, serta menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi secara mandiri maupun bersama pihak lain. Dalam tataran empiris, pelaku usaha informal umumnya mengelola unit usaha dengan model produksi yang sederhana dan manajemen yang bersifat konvensional (Saputra, 2019). Peran mereka sangat strategis sebagai penyerap tenaga kerja

yang tidak berhasil masuk ke sektor formal sekaligus sebagai sumber pendapatan yang berpotensi berkembang apabila dikelola dengan tepat.

Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan indikator utama dalam mengukur kondisi ekonomi suatu unit usaha. Secara matematis, pendapatan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah unit yang terjual dengan harga per unitnya, dirumuskan sebagai $TR = P \times Q$. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat pendapatan mengacu pada klasifikasi Badan Pusat Statistik yang membagi pendapatan menjadi empat golongan, yaitu sangat tinggi apabila pendapatan bulanan melebihi Rp3.500.000; tinggi apabila berkisar Rp2.500.000–Rp3.500.000; sedang apabila berkisar Rp1.500.000–Rp2.500.000; serta rendah apabila di bawah Rp1.500.000 per bulan.

Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang secara fisik, mental, dan sosial secara berkesinambungan. Rifaldi & Indra (2019) menetapkan delapan parameter pengukuran kesejahteraan, salah satunya adalah taraf dan pola konsumsi. Dalam penelitian ini, kesejahteraan diukur melalui proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan terhadap total pengeluaran bulanan. Semakin besar proporsi tersebut, semakin rendah tingkat kesejahteraan yang dicapai. Berdasarkan kriteria BPS, kesejahteraan dikategorikan tinggi apabila proporsi pengeluaran makanan kurang dari 30%; sedang apabila berkisar 30%–50%; dan rendah apabila melebihi 50% dari total pengeluaran bulanan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu menjadi landasan komparatif dalam penelitian ini. Sebagian besar pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Natsepa berada pada tingkat kesejahteraan sedang sebesar 75%, dengan faktor jumlah anggota keluarga dan curahan waktu kerja sebagai variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan. Pengembangan kawasan Wisata Danau Sipin memberikan dampak ekonomi positif berupa peningkatan kualitas hidup dan tersedianya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Mayoritas pelaku usaha skala kecil berada pada tingkat kesejahteraan yang relatif memadai meskipun bergerak dengan modal dan kapasitas produksi yang terbatas. Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menunjukkan pola yang konsisten bahwa tingkat pendapatan pelaku usaha di sektor informal memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan yang mereka capai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif berbasis survei lapangan yang bertujuan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi pendapatan serta kesejahteraan pelaku usaha di kawasan wisata. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis statistik, melainkan menguraikan fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden secara langsung. Penelitian dilaksanakan di Wisata Danau Sipin yang berlokasi di antara Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu sentra aktivitas ekonomi informal yang berkembang pesat seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner terstruktur oleh para pelaku usaha yang menjadi responden penelitian. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat (Rifaldi & Indra, 2019), serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha yang berdagang secara aktif di kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi. Berdasarkan hasil pendataan awal, jumlah keseluruhan pelaku usaha tercatat sebanyak 50 orang. Mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh (Sholahuddin, 2019) bahwa apabila jumlah populasi berada di bawah angka 100, maka seluruh anggota populasi dapat dijadikan sampel penelitian secara menyeluruh, maka teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah teknik sensus atau yang lazim disebut teknik *jenuh sampling*, yakni mengikutsertakan seluruh populasi sebagai responden. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 pelaku usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang memuat pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti, sehingga jawaban yang diperoleh bersifat terarah dan dapat digunakan untuk menganalisis fokus permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan data dan fakta yang diperoleh dari responden ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang disertai dengan interpretasi dan pembahasan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan guna menarik kesimpulan mengenai tingkat pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha di lokasi penelitian. Operasional variabel dalam penelitian ini mencakup dua variabel utama. Pertama, variabel pendapatan yang diukur berdasarkan pendapatan bersih pelaku usaha setiap bulan dan diklasifikasikan ke dalam empat golongan menurut kriteria BPS, yaitu: golongan sangat tinggi apabila pendapatan bulanan melebihi

Rp3.500.000; golongan tinggi apabila berada pada kisaran Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000; golongan sedang apabila berada pada kisaran Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000; serta golongan rendah apabila pendapatan bulanan di bawah Rp1.500.000. Kedua, variabel kesejahteraan yang diukur melalui pendekatan taraf dan pola konsumsi rumah tangga, khususnya dengan menghitung persentase proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap total keseluruhan pengeluaran rumah tangga setiap bulannya. Berdasarkan kriteria tingkat kesejahteraan dikategorikan menjadi tiga: tinggi apabila proporsi pengeluaran untuk makanan kurang dari 30% dari total pengeluaran; sedang apabila berkisar antara 30% hingga 50%; dan rendah apabila proporsi tersebut melampaui angka 50% dari total pengeluaran bulanan rumah tangga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosial Ekonomi Pelaku Usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi

Karakteristik sosial ekonomi merupakan gambaran posisi seseorang dalam struktur masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, serta besaran pendapatan yang diperoleh. Pemahaman terhadap karakteristik ini menjadi dasar penting dalam menganalisis kondisi pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha secara komprehensif. Penelitian ini melibatkan 50 responden yang seluruhnya merupakan pelaku usaha aktif di kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi, dengan karakteristik yang dikaji meliputi umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, jumlah tanggungan, status pernikahan, lama usaha, modal usaha, jenis usaha, tenaga kerja, dan jam kerja.

Umur dan Tingkat Pendidikan

Usia pelaku usaha memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas dan kematangan dalam mengelola usaha. Berdasarkan hasil pengolahan data, distribusi usia responden disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.

Umur (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
16–25	3	6%
26–35	9	18%
36–45	19	38%
46–55	15	30%
56–65	4	8%
Total	50	100%
Rata-rata	42,1 tahun	-

Sumber: Data Primer Diolah, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata usia pelaku usaha adalah 42 tahun, dengan kelompok usia 36–45 tahun sebagai kelompok terbesar yang mencakup 19 responden atau 38% dari total sampel. Pada rentang usia tersebut, individu umumnya telah memiliki tanggungan keluarga yang mendorong mereka untuk mencari sumber penghasilan di sektor informal sebagai tumpuan ekonomi rumah tangga. Sebaliknya, kelompok usia 16–25 tahun hanya diwakili 3 responden atau 6%, yang mengindikasikan keterlibatan generasi muda masih sangat terbatas karena usaha yang dijalani umumnya hanya bersifat sampingan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Tiandra (2020) bahwa curahan waktu dan intensitas kerja seseorang di sektor informal dipengaruhi secara signifikan oleh usia dan beban tanggungan yang dimiliki.

Dari sisi pendidikan, mayoritas pelaku usaha berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 22 responden atau 44%, diikuti SMP sebanyak 14 responden atau 28%, SD sebanyak 11 responden atau 22%, dan sarjana hanya 3 responden atau 6%. Rendahnya tingkat pendidikan yang mendominasi mencerminkan karakteristik umum sektor informal sebagaimana dikemukakan Pelaku usaha informal umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang tidak tinggi namun tetap mampu bertahan dengan mengandalkan pengalaman dan keterampilan praktis yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Jenis Kelamin, Tanggungan, dan Status Pernikahan

Komposisi jenis kelamin menunjukkan dominasi perempuan dengan 29 responden atau 58%, sementara laki-laki berjumlah 21 responden atau 42%. Tingginya keterlibatan perempuan di kawasan ini berkaitan erat dengan kemampuan mereka dalam membangun interaksi sosial yang lebih akrab dengan konsumen, termasuk dalam hal negosiasi harga dan menjaga loyalitas pembeli. Hal ini juga mencerminkan bahwa sektor informal di kawasan wisata bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin, sebagaimana disampaikan oleh bahwa fleksibilitas sektor informal menjadi daya tarik utama bagi berbagai karakteristik angkatan kerja yang membutuhkan sumber penghasilan alternatif.

Dari sisi jumlah tanggungan, kelompok terbesar adalah pelaku usaha dengan 2 jiwa tanggungan sebanyak 13 responden atau 26%, sementara 10 responden tidak memiliki tanggungan sama sekali. Besarnya jumlah tanggungan dapat menjadi motivasi sekaligus tekanan bagi pelaku usaha, karena di satu sisi anggota keluarga berpotensi menjadi tenaga kerja tanpa biaya tambahan, namun di sisi lain pengeluaran rumah tangga yang besar dapat menghambat akumulasi modal usaha. Adapun terkait status pernikahan, sebanyak 42 responden atau 84% telah menikah, 5 responden atau 10% belum menikah, dan 3 responden atau 6% berstatus cerai. Tingginya proporsi responden yang sudah menikah menegaskan

bahwa motivasi utama pelaku usaha di kawasan ini adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Lama Usaha, Modal, Jenis Usaha, Tenaga Kerja, dan Jam Kerja

Distribusi lama usaha, jenis usaha, tenaga kerja, dan jam kerja disajikan secara ringkas pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha, Jenis Usaha, Tenaga Kerja, dan Jam Kerja.

Variabel	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Lama Usaha (Tahun)	< 3	22	44%
	4–6	24	48%
	7–9	3	6%
	> 10	1	2%
Jenis Usaha	Makanan	23	46%
	Minuman	15	30%
	Warung	5	10%
	Mainan	4	8%
	Restoran/Kafe	3	6%
Tenaga Kerja (Orang)	1	38	76%
	2	10	20%
	3	2	4%
Jam Kerja (Jam/Hari)	0–5	26	52%
	6–10	20	40%
	11–15	3	6%
	16–20	1	2%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, kelompok lama usaha 4–6 tahun mendominasi dengan 24 responden atau 48%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih tergolong relatif baru dan belum memiliki basis pelanggan yang stabil. Dari sisi modal, mayoritas beroperasi dengan modal antara Rp1.000.000 hingga Rp3.999.999 sebanyak 22 responden atau 44%, sementara 19 responden atau 38% bermodal di bawah Rp1.000.000. Kondisi permodalan yang sangat terbatas ini berimplikasi langsung pada rendahnya kapasitas produksi dan variasi produk yang ditawarkan, yang pada akhirnya menekan pendapatan yang dapat dihasilkan (Tiandra, 2020). Jenis usaha yang paling banyak digeluti adalah penjualan makanan sebanyak 23 responden atau 46%, mencerminkan tingginya permintaan konsumsi pengunjung wisata terhadap produk kuliner. Dari sisi tenaga kerja, sebanyak 38 responden atau 76% menjalankan usahanya secara mandiri tanpa bantuan tenaga kerja lain, yang sejalan dengan karakteristik unit usaha informal berskala sangat kecil sebagaimana dinyatakan oleh (Umar & Husein, 2005). Alokasi jam kerja paling banyak berada pada kategori 5 jam per hari ke bawah yakni 26

responden atau 52%, yang mengindikasikan bahwa berdagang di kawasan wisata ini bagi sebagian besar pelaku usaha hanya merupakan pekerjaan sampingan yang tidak dijalani secara penuh waktu.

Analisis Tingkat Pendapatan Pelaku Usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi

Pendapatan merupakan cerminan langsung dari kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pengukuran tingkat pendapatan dalam penelitian ini didasarkan pada pendapatan bersih bulanan setiap pelaku usaha yang kemudian diklasifikasikan menggunakan empat golongan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Hasil klasifikasi tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tingkat Pendapatan Pelaku Usaha Per Bulan di Wisata Danau Sipin Kota Jambi.

Tingkat Pendapatan BPS (Rp/Bulan)	Jumlah Responden	Kriteria
> 3.500.000	9	Sangat Tinggi
2.500.000 – 3.500.000	8	Tinggi
1.500.000 – 2.500.000	13	Sedang
< 1.500.000	20	Rendah
Rata-rata: Rp2.486.000	50	Sedang

Sumber: Data Primer Diolah, 2026.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa kelompok pendapatan rendah di bawah Rp1.500.000 per bulan merupakan kelompok terbesar dengan 20 responden atau 40% dari total sampel. Kelompok pendapatan sedang ditempati 13 responden atau 26%, diikuti kelompok sangat tinggi sebanyak 9 responden atau 18%, dan kelompok tinggi sebanyak 8 responden atau 16%. Meskipun demikian, nilai rata-rata pendapatan seluruh responden sebesar Rp2.486.000 per bulan menempatkan kondisi pendapatan pelaku usaha secara keseluruhan pada kategori sedang menurut kriteria BPS. Pola distribusi pendapatan tersebut dapat dicermati secara visual pada gambar berikut.



Gambar 1. Diagram Pola Penyebaran Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Kriteria Tingkat Pendapatan.

(Sumber: Data Primer Diolah, 2026).

Gambar 5.1 di atas memperlihatkan pola penyebaran jumlah pelaku usaha berdasarkan kriteria tingkat pendapatan. Terlihat bahwa pelaku usaha dengan tingkat pendapatan rendah menempati urutan pertama sebanyak 20 orang atau 40%, diikuti tingkat pendapatan sedang di urutan kedua sebanyak 13 orang atau 26%, kemudian tingkat pendapatan sangat tinggi di urutan ketiga sebanyak 9 orang atau 18%, dan terakhir tingkat pendapatan tinggi sebanyak 8 orang atau 16% dari total keseluruhan sampel.

Rendahnya pendapatan pada sebagian besar responden disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Keterbatasan modal menjadi kendala utama yang membatasi kapasitas produksi dan keragaman produk yang ditawarkan. Faktor cuaca yang tidak menentu juga kerap menjadi penghambat terjadinya transaksi jual beli, terutama saat kunjungan wisatawan mengalami penurunan pada hari-hari tertentu. Selain itu, ketiadaan tenaga kerja tambahan membatasi kapasitas layanan, sementara sebagian pelaku usaha hanya beroperasi pada akhir pekan sehingga frekuensi transaksi yang diperoleh jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang berjualan setiap hari. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Sianturi, 2019) yang menyatakan bahwa meskipun kawasan Wisata Danau Sipin memberikan peluang ekonomi yang terbuka, kualitas dan besaran pendapatan pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan secara individual.

Analisis Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi

Pengukuran tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini mengacu pada indikator taraf dan pola konsumsi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, khususnya dengan melihat perbandingan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan terhadap total keseluruhan pengeluaran setiap bulannya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa semakin besar proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan yang dicapai, karena hal itu mencerminkan sempitnya ruang untuk memenuhi kebutuhan non-makanan yang lebih beragam seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan (Sugiharto, 2007). Hasil analisis kesejahteraan disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi.

Pengeluaran (Rp/Bulan)	RT	Frekuensi	Kriteria Kesejahteraan	Jumlah Pelaku Usaha
> 3.500.000		4	Tinggi / Sedang / Rendah	2 / 2 / 0
2.500.000 – 3.500.000	–	4	Tinggi / Sedang / Rendah	2 / 2 / 0
1.500.000 – 2.500.000	–	15	Tinggi / Sedang / Rendah	1 / 10 / 4
< 1.500.000		27	Tinggi / Sedang / Rendah	0 / 11 / 16
Rata-rata: Rp1.727.000		50	Tinggi=5, Sedang=25, Rendah=20	50

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4, rata-rata total pengeluaran rumah tangga pelaku usaha per bulan adalah Rp1.727.000, dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar Rp747.000 atau setara dengan 48,41% dari total pengeluaran. Angka persentase tersebut berada dalam rentang 30%–50% yang oleh BPS (2022) dikategorikan sebagai tingkat kesejahteraan sedang. Secara distribusi, 25 pelaku usaha atau 50% dari total sampel berada pada kategori kesejahteraan sedang, 20 pelaku usaha atau 40% berada pada kategori rendah, dan hanya 5 pelaku usaha atau 10% yang berhasil mencapai kategori kesejahteraan tinggi. Distribusi kesejahteraan tersebut dapat diamati secara lebih jelas melalui gambar berikut.



Gambar 2. Diagram Pola Penyebaran Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Kriteria Tingkat Kesejahteraan.

(Sumber: Data Primer Diolah, 2026)

Gambar 5.2 di atas menjelaskan pola penyebaran jumlah pelaku usaha berdasarkan kriteria tingkat kesejahteraan. Berdasarkan persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dari total pengeluaran setiap bulannya, terlihat bahwa pelaku usaha dengan

tingkat kesejahteraan sedang mendominasi dengan 25 orang atau 50% dari total sampel. Urutan berikutnya ditempati oleh tingkat kesejahteraan rendah sebanyak 20 orang atau 40%, dan terakhir tingkat kesejahteraan tinggi hanya sebanyak 5 orang atau 10% dari keseluruhan sampel penelitian. Besarnya proporsi pelaku usaha pada kategori sedang dan rendah mencerminkan bahwa sebagian besar dari mereka belum mampu menggeser pola pengeluaran secara signifikan dari pemenuhan kebutuhan makanan menuju kebutuhan non-makanan yang lebih produktif. Kondisi ini erat kaitannya dengan rendahnya pendapatan yang diterima oleh mayoritas responden sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pelaku usaha yang berhasil masuk ke kategori kesejahteraan tinggi umumnya adalah mereka yang memiliki pendapatan di atas rata-rata sampel, yakni pemilik warung, kafe, atau restoran yang telah beroperasi dalam jangka waktu lebih lama serta memiliki basis pelanggan yang lebih stabil dan modal usaha yang lebih besar. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Saputra, 2022) yang menemukan pola serupa pada pelaku usaha di kawasan wisata, di mana sebagian besar responden berada pada tingkat kesejahteraan sedang dengan hanya sebagian kecil yang mencapai tingkat kesejahteraan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Wisata Danau Sipin sebagai pusat aktivitas ekonomi informal belum sepenuhnya mampu mendorong seluruh pelaku usaha ke tingkat kesejahteraan yang optimal, sehingga diperlukan intervensi yang lebih terstruktur dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses permodalan, dan mendorong diversifikasi sumber pendapatan bagi pelaku usaha di kawasan tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 pelaku usaha di Wisata Danau Sipin Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa secara karakteristik sosial ekonomi, rata-rata usia pelaku usaha berada pada kisaran 42 tahun dengan mayoritas berpendidikan SMA/SMK, didominasi oleh pelaku usaha perempuan sebesar 58%, rata-rata memiliki 2 jiwa tanggungan, bermodal antara Rp1.000.000–Rp3.999.999, menjalankan usaha makanan secara mandiri dengan jam kerja di bawah 5 jam per hari. Dari sisi pendapatan, nilai rata-rata bulanan sebesar Rp2.486.000 menempatkan pelaku usaha pada kategori sedang berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik, meskipun 40% responden masih berada pada kategori pendapatan rendah. Adapun dari sisi kesejahteraan, rata-rata proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 48,41% dari total pengeluaran rumah tangga mengkategorikan pelaku usaha pada tingkat kesejahteraan sedang. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk secara bertahap memperkuat permodalan, meningkatkan variasi produk, membangun relasi yang baik dengan konsumen,

serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kawasan wisata guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif, produktif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat dirampungkan dengan baik. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program sarjana penulis. Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan ilmiah yang sangat berarti selama proses penyusunan berlangsung. Apresiasi mendalam juga ditujukan kepada seluruh 50 pelaku usaha di kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai responden penelitian. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat tanpa henti hingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z. (2020). Pengaruh modal usaha dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kecil di sektor informal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 101–110.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indikator kesejahteraan rakyat*.
- Effendi, M. S., Komsiah, S., & Suwartane, I. G. A. (2025). Transformasi digital UMKM: Integrasi manajemen keuangan dengan platform peta wisata dan marketplace. *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 8(1), 62–72.
- Fakhria, M., A'in, C., Rudiyan, S., & Megarani, A. A. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui pembinaan penguatan branding dan digitalisasi untuk mendukung smart ecotourism Kelurahan Tugurejo Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 5(4), 78–88. <https://doi.org/10.56910/safari.v5i4.3226>
- Hidayat, R., & Lestari, N. (2022). Peran UMKM dalam peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan wisata. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 45–56.
- Jose, O., & Araujo, M. D. E. (2021). Optimalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Keiku, A. N. (2020). Analisis pengaruh modal, usia, dan pendidikan terhadap pendapatan pelaku usaha skala mikro (studi pedagang kaki lima di Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang). <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i1.4761>
- Kurniawan, D. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan pedagang di sektor informal perkotaan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 15(1), 33–44. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i1.7648>
- Mangawuhi, K. E. (2024). Analisis pendapatan pedagang salak di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro.

- Nababan, D. M. (2023). Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan pedagang di Pasar Tradisional Aur Duri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- Putri, D. R., Hidayat, M. S., Ilman, M. W., & Fauziyah, S. N. (2025). Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 4(2).
- Rifaldi, & Indra. (2019). Analisis pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja informal di Kota Rengat (studi kasus pedagang kaki lima). Universitas Islam Riau.
- Saputra, H. (2022). Analisis dampak pengembangan pariwisata Danau Sipin terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kota Jambi. <https://doi.org/10.22437/jpb.v5i1.21197>
- Saputra. (2019). Analisis kesejahteraan pedagang kaki lima di Kota Sigli Kabupaten Pidie. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Sari, D. K., & Wibowo, A. (2021). Analisis tingkat kesejahteraan pelaku UMKM di sektor pariwisata berbasis ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(3), 215–226.
- Sholahuddin, M. D. (2019). Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga industri makanan ringan bongolan.
- Sianturi, F. A. (2019). Analisis sebaran sektor informal di Kota Manado.
- Tiandra, N. (2020). The effect of e-commerce on MSME's performance improvement (case study on MSME's in Sumbawa District).
- Umar, H. (2005). *Manajemen strategi*. Erlangga.
- Wijaya, A., & Prasetyo, B. (2023). Digitalisasi UMKM dan dampaknya terhadap pendapatan pelaku usaha mikro. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 6(2), 88–97.